

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Sumaria

Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Email: sumariacemonk@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam membiayai pembiayaan daerah, dan apakah terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah kabupaten Batang Hari tahun 2010-2014. Metode analisis yang digunakan Analisis kontribusi dan Korelasi Pearson dengan uji Normalitas. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari dilihat dari kontribusinya tahun 2010-2014 berfluktuasi dengan rata-rata 5,45% pertahunnya begitu juga dengan Dana Alokasi Umum yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan bergerak kearah yang positif, dengan rata-rata 54,91% pertahunnya. Sementara itu terdapat hubungan antara PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan uji statistik, uji perbedaan ini menunjukkan bahwa nilai sig. (2 tailed) < 0,05 (0,013 < 0,05), sehingga terdapat hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah, dilihat dari nilai koefisien korelasi PAD terhadap Belanja Daerah bernilai positif yaitu 0,952, hubungannya sangat kuat/sempurna artinya jika PAD naik maka Belanja Daerah naik dan jika PAD turun maka Belanja Daerah juga turun. Sementara uji statistic DAU menunjukkan nilai sig. (2 tailed) < 0,05 (0,043 < 0,05), sehingga terdapat hubungan antara DAU dengan Belanja Daerah, dilihat nilai koefisien korelasinya yaitu juga bernilai positif 0,891, hubungannya sangat kuat/sempurna artinya apabila DAU naik maka Belanja Daerah juga naik, jika DAU turun maka Belanja Daerah juga turun.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah

Latar Belakang

Pada era otonomi daerah sekarang ini daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Setiap daerah harus mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjunjung keberhasilan otonomi daerah, diantaranya: sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber daya alam, kemampuan mengelola keuangan daerah, kondisi social budaya masyarakat, dan kemampuan manajemen (Halim, 2004).

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relative kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan kata lain peranan / kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah

pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak mendominasi susunan APBD.

Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat di gali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD. Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah, khususnya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan daerah karena 90 % diantaranya adalah menjadi hak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari terdiri dari Pajak, Retribusi, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah. Kabupaten Batang Hari sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan daerah dari berbagai sektor.

Kabupaten Batang Hari sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian sedang giat- giatnya melaksanakan pembangunan daerah kearah yang lebih baik, dalam pelaksanaannya membutuhkan dana yang besar untuk pembiayaan pembangunannya. Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari terus diupayakan melalui sumber- sumber penerimaan yang memiliki potensi besar seperti peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan PAD dan DAU merupakan suatu langkah kebijakan yang dapat diambil pemerintah sebagai salah satu langkah menuju kesejahteraan masyarakat dan memberi pelayanan kepada masyarakat dalam menuju pembangunan daerah. PAD dan DAU merupakan bagian dari pendapatan daerah yang memacu kemandirian kemampuan dalam membiayai pembangunan daerah dan pada akhirnya berpengaruh pada belanja daerah.

Penerimaan PAD dan DAU merupakan suatu langkah kebijakan yang dapat diambil pemerintah sebagai salah satu langkah menuju kesejahteraan masyarakat dan memberi pelayanan kepada masyarakat dalam menuju pembangunan daerah. PAD dan

DAU merupakan bagian dari pendapatan daerah yang memacu kemandirian kemampuan dalam membiayai pembangunan daerah dan pada akhirnya berpengaruh pada belanja daerah.

Rumusan Masalah

1. Berapa besar kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari ?
2. Berapa besar kemampuan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari ?
3. Bagaimana hubungan antara penerimaan PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kemampuan PAD dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kemampuan DAU dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara penerimaan PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

Metode Penelitian

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama lima tahun yaitu dari tahun 2010-2014. Dan data kuantitatif berupa data laporan perhitungan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif kuantitatif dan kuantitatif. Metode Deskriptif kuantitatif dimaksudkan untuk melihat Kemampuan keadaan objek yang diteliti (dalam penelitian ini adalah untuk melihat Kemampuan PAD dan DAU dalam memenuhi pembiayaan daerah) dan di tampilkan dalam bentuk data yang berupa persentase, tabel dan sebagainya. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja daerah di Kabupaten Batang Hari.

Dengan menggunakan metode ini penulis dapat mengetahui besarnya Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja daerah (Y) di Kabupaten Batang Hari dari tahun 2010-2014.

1. Untuk menjawab tujuan pertama menghitung kemampuan PAD dalam memenuhi pembiayaan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus kontribusi (Halim, 2004)
2. Untuk menjawab tujuan kedua menghitung kemampuan DAU dalam memenuhi pembiayaan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus kontribusi (Halim, 2004)
3. Untuk menjawab tujuan ketiga mengetahui Hubungan antara PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah menggunakan rumus Korelasi Pearson sebagai berikut :

Interpretasi Koefisien Korelasi

Interpretasi Korelasi	Kategori Korelasi
0,00-0,25	Tidak ada hubungan/lemah
0,26 -0,50	Hubungan Sedang
0,51-0,75	Hubungan Kuat
0,76-1,00	Hubungan sangat kuat/sempurna

Hasil Dan Pembahasan

Untuk melaksanakan tugas pemerintah tersebut diperlukan sarana penunjang yang sangat memadai, dalam hal ini keuangan merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. PAD sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari agar tidak tergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari terus menerus berusaha untuk meningkatkan PAD untuk lebih memperkuat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam memacu kemampuan pendapatan daerah.

Tabel 1. Kemampuan PAD dalam Memenuhi Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014

Tahun	PAD (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Kemampuan (%)
2010	22.251.818.221,45	514.796.607.603,47	4,32
2011	34.553.020.750,27	619.870.137.344,00	5,57
2012	37.229.501.178,41	746.917.004.552,28	4,98
2013	50.623.238.098,26	935.734.122.052,00	5,41
2014	70.304.984.187,66	1.007.493.288.115,00	6,97
Rata-rata			5,45

Sumber : DISPENDA Batang Hari

Berdasarkan tabel dapat dilihat kemampuan PAD dalam memenuhi pembiayaan daerah dilihat dari kontribusinya Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2014. Selama periode tersebut kemampuan PAD dalam memenuhi pembiayaan daerah mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2010 kemampuan PAD dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari sebesar 4,32 % dan tergolong masih rendah sekali. Kemudian tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 5,57 % dan kembali turun tahun 2012 sebesar 4,98%. Dan kembali meningkat pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 5,41% dan 6,97% . PAD terbesar terdapat pada tahun 2014 dengan presentase sebesar 6,978 %, ini disebabkan meningkatnya sumber-sumber penerimaan dari sumber PAD terutama dari sector pajak. Sedangkan penerimaan PAD terendah pada tahun 2010 dengan presentase sebesar 4,32%. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah pendapatan dari sector pajak, retribusi daerah.

Berdasarkan kemampuan PAD dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari dapat dilihat rata-rata kontribusi PAD Kabupaten Batang Hari selama 5 tahun terakhir sebesar 5,45 % pertahunnya.

DAU merupakan dana yang bersifat hibah murni yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima. DAU diberikan Pemerintah Pusat untuk membiayai kekurangan dari Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan PAD. Salah satu alasan penting mengapa transfer pusat kepada daerah dilakukan adalah guna menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum diseluruh negeri. Hal ini disebabkan karena pada umumnya kondisi keuangan dibanyak daerah dalam potensi daerahnya. Sehingga perlu peran pemerintah pusat untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui transfer kepada daerah, pada dasarnya diberikan kepada daerah untuk lebih pemeratakan kemampuan fiscal pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dengan adanya transfer pusat untuk tujuan umum maka pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih besar.

Tabel 2. Kemampuan DAU dalam Memenuhi Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014

Tahun	DAU (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Kemampuan (%)
2010	283.646.310.000,00	514.796.607.603,47	55,09
2011	344.797.921.000,00	619.870.137.344,00	55,62
2012	427.893.466.000,00	746.917.004.552,28	57,28
2013	507.478.487.000,00	935.734.122.052,00	54,23
2014	527.233.482.000,00	1.007.493.288.115,00	52,33
Rata-rata			54,91

Sumber : DISPENDA Kabupten Batang Hari

Berdasarkan tabel dapat dilihat kemampuan DAU dalam memenuhi pembiayaan daerah dilihat dari kontribusinya Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2014. Selama periode tersebut kemampuan DAU dalam memenuhi pembiayaan daerah mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2010 kemampuan DAU dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari sebesar 55,09%. Kemudian tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan sebesar 55,62% dan 57,28%. Dilanjutkan dengan tahun 2013 dan 2014 kembali mengalami penurunan sebesar 54,23% dan 52,33%.

Dari uraian diatas dapat dikatakan kemampuan DAU dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 57,28%, hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan DAU Kabupaten Batang Hari pada tahun ini disebabkan karena adanya kenaikan belanja pegawai juga disebabkan karena meningkatnya belanja barang yang disebabkan kenaikan harga-harga barang. Sedangkan kemampuan DAU dalam memenuhi pembiayaan daerah terendah terdapat pada tahun 2014 yaitu hanya sebesar 52,33%, itu disebabkan karena tidak terjadi perubahan secara signifikan beberapa indikator perhitungan DAU seperti, jumlah penduduk, penduduk miskin, luas wilayah dan sebagainya. Faktor lainnya disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana bagi pembiayaan pembangunan di daerah Kabupaten/kota. Secara rata-rata kemampuan DAU dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2014 adalah sebesar 54,91 % pertahunnya.

Tabel 3 Hasil Perhitungan Korelasi Antara PAD dengan Belanja Daerah

		PAD	Belanja_Daerah
PAD	Pearson Correlation	1	.952*
	Sig. (2-tailed)		.013
	N	5	5
Belanja_Daerah	Pearson Correlation	.952*	1
	Sig. (2-tailed)	.013	
	N	5	5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

sumber : spss data diolah

Kesimpulannya : Jika nilai sig.(2 tailed). $< 0,05$ maka terdapat Hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah. Jika terdapat hubungan antara nilai omentin dan profilin maka lihat nilai koefisien korelasi (r). Jika positif, artinya jika PAD naik maka Belanja Daerah naik dan jika PAD turun maka Belanja Daerah turun. Jika negatif, artinya jika PAD naik Belanja Daerah turun dan jika PAD turun Belanja Daerah naik. Jika nilai sig. (2 tailed) $> 0,05$ maka tidak terdapat Hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah. Naik turunya PAD tidak akan berhubungan langsung dengan peningkatan Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil uji di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. (2 tailed) $< 0,05$ (0,013 $< 0,05$) sehingga kesimpulannya terdapat Hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah. Pada hasil uji di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi bernilai positif yaitu 0.952, hubungan sangat kuat/ sempurna berada dalam interval 0,76-1,00 artinya saat PAD naik maka Belanja Daerah akan naik dan jika PAD turun maka Belanja Daerah juga akan turun.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang diealisasi melalui Belanja Daerah, dan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAU yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin meningkat penerimaan Belanja Daerah.

Hal ini disebabkan karena peran DAU signifikan, karena Belanja Daerah lebih di dominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang di terima pemerintah daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah. Hal ini tidak jauh beda dengan peran PAD yaitu dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan Belanja Daerah.

Tabel 4 Hasil Perhitungan Korelasi Antara DAU dengan Belanja Daerah

		DAU	Belanja_Daerah
DAU	Pearson	1	.891*
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)		.043
	N	5	5
Belanja_Daerah	Pearson	.891*	1
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.043	
	N	5	5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : spss data diolah

Kesimpulannya : Jika nilai sig.(2 tailed). $< 0,05$ maka terdapat Hubungan antara DAU dengan Belanja Daerah. Jika terdapat hubungan antara nilai omentin dan profilin maka lihat nilai koefisien korelasi (r). Jika positif, artinya jika DAU naik maka Belanja Daerah naik dan jika DAU turun maka Belanja Daerah juga turun. Jika negatif, artinya

jika DAU naik Belanja Daerah turun dan jika DAU turun Belanja Daerah naik. Jika nilai sig. (2 tailed) > 0,05 maka tidak terdapat Hubungan antara DAU dengan Belanja Daerah. Naik turunnya DAU tidak akan berhubungan langsung dengan peningkatan Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil uji di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. (2 tailed) < 0,05 (0,043 < 0,05) sehingga kesimpulannya terdapat Hubungan antara DAU dengan Belanja Daerah. Pada hasil uji di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi bernilai positif 0.891, hubungan sangat kuat atau sempurna berada dalam interval 0,76-1,00 artinya jika DAU naik maka Belanja Daerah naik dan Jika DAU turun maka Belanja Daerah Turun.

Kesimpulan

1. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari dilihat dari kontribusinya selama lima tahun terakhir berfluktuasi dari tahun ke tahun selama tahun 2010-2014 dengan rata-rata sebesar 5,45 persen pertahunnya.
2. Kemampuan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam memenuhi pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari dilihat dari kontribusinya selama lima tahun terakhir berfluktuasi dari tahun ke tahun selama tahun 2010-2014 dengan rata-rata sebesar 54,91 persen pertahunnya.
3. Terdapat hubungan antara PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah, naik turunnya PAD dan DAU tidak akan berhubungan langsung dengan peningkatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan uji statistic, uji perbedaan ini menunjukkan bahwa hasil sig. (2 tailed) < 0,05 (0,013 < 0,05) sehingga kesimpulannya terdapat Hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah. Pada hasil uji korelasi dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (r) bernilai positif yaitu 0,952, hubungan sangat kuat/semurna artinya jika PAD naik maka Belanja Daerah naik dan jika PAD turun maka Belanja Daerah juga turun. Sementara itu, Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, berdasarkan uji statistik menunjukkan hasil sig. (2 tailed) < 0,05 (0,043 < 0,05) sehingga kesimpulannya terdapat Hubungan antara DAU dengan Belanja Daerah. Pada hasil uji korelasi dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (r) bernilai positif yaitu 0, 891, hubungan sangat kuat/semurna artinya jika DAU naik maka Belanja Daerah naik dan jika DAU turun maka Belanja Daerah juga turun.

Saran

1. Dikarenakan Pendapatan Asli Daerah adalah gambaran kemandirian daerah dan merupakan sumber pendapatan suatu daerah khususnya Kabupaten Batang Hari maka Pemerintah harus lebih giat lagi dalam menggali sumber-sumber yang ada, dan mengelolanya dengan tepat agar Kemampuan PAD dalam membiayai pembiayaan daerah terus jauh lebih meningkat lagi.
2. Dikarenakan Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, diharapkan pemerintah kabupaten Batang Hari tidak tergantung dari dana pemerintah pusat saja, tetapi harus terus menggali sumber- sumber pendapatan yang ada.
3. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa besarnya PAD dan DAU kurang memberikan kontribusi kepada Belanja Daerah. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Batang Hari lebih meningkatkan Potensi Daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar dapat menunjang kegiatan Belanja Daerah.

Daftar Pustaka

- Dwi, s, Adrianus. 2008. manajemen public. Jakarta: Erlangga
- Eka Rahmawati, I. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Merangin. Skripsi Sarolangun.
- Halim, Abdul, 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masyhuri, Zainudin, 201. Metodologi Penelitian, Rafika Aditama.
- Nurlan Darise, 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi kedua, Jakarta, Indeks.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang *Laporan Realisasi Anggaran*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Republik indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Riduwan dan Sunarto, 2009. Pengantar Statistika, Cetakan kedua, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Saragih, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Saroji, Aan Anwar, 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Di Jawa Tengah Tahun 2008. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik, Edisi pertama, Andi Yogyakarta.
- Utami. 2007. Analisis Hubungan Dana Alokasi Umum, Bagi hasil Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Rutin (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Samarinda). Skripsi.
- Widjaya, 2001. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, Rajawali Pers